

OPTIMALISASI SUMBER DAYA MANUSIA MELALUI TATA KELOLA KEUANGAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) DALAM PENERAPAN E-GOVERNMENT DI KECAMATAN CIPEUNDEUY KABUPATEN SUBANG

Titin Rohayatin, Dadan Kurnia, Noer Apptika Fujilestari, Siti Munawaroh

Ilmu Pemerintahan, Universitas Jenderal Achmad Yani, Kota Cimahi

Alamat Korespondensi : Jl. Terusan Jenderal Soedirman, Cimahi Selatan – Kota Cimahi

E-mail: noer.apptika@lecture.unjani.ac.id

Abstrak

Tata Kelola manajemen Sumber Daya Manusia dalam pengelolaan penyelenggaraan pemerintahan harus di manage dengan baik, karena Sumber daya manusia aparatur pemerintah akan memiliki dampak terhadap berbagai arah, termasuk dalam tata Kelola Keuangan Desa, tata Kelola Keuangan Bumdes. Tata Kelola Keuangan Desa dan tata Kelola Keuangan Bumdes perlu dilakukan secara baik dan benar serta bersifat transparan guna menghindari ada penyimpangan dan penyalahgunaan dari penggunaan keuangan tersebut. Tata Kelola keuangan desa, tata Kelola keuangan Bumdes ini dapat meningkatkan potensi keuangan desa dan akhirnya dapat meningkatkan tingkat ekonomi Masyarakat dan dapat meningkatkan taraf kehidupan kesejahteraan Masyarakat. Tata Kelola keuangan desa, dan tata Kelola keuangan Badan Usaha milik desa dengan cara mengoptimalkan dari potensi desa maka akan menopang kehidupan perekonomian Masyarakat desa dan akan mendukung terhadap Program Pemerintah bahwa Pembangunan desa merupakan garda terdepan bagi Pembangunan Nasional. Beberapa penerapan teknologi informasi sebagai bentuk wujud digitalisasi desa sudah tersedia untuk membantu Pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan desa, diharapkan dengan adanya teknologi informasi tersebut sebagai bentuk penerapan e- Government dalam pemerintahan desa yang tujuannya mewujudkan Smart Village dan menuju desa mandiri.

Abstract

Management of Human Resources in the management of government administration must be managed well, because the human resources of government officials will have an impact in various directions, including Village Financial Management, Bumdes Financial Management. Village Financial Governance and Bumdes Financial Management need to be carried out properly and correctly and transparently in order to avoid deviations and misuse of the use of these finances. Village financial management, Bumdes financial management can increase the village's financial potential and ultimately can improve the economic level of the community and can improve the welfare of the community. Village financial management and financial management of village-owned enterprises by optimizing village potential will support the economic life of village communities and will support the Government Program that village development is at the forefront of National Development. Several applications of information technology as a form of village digitalization are already available to assist the village government in managing village finances. It is hoped that this information technology will be a form of implementing e-Government in village government with the aim of realizing a Smart Village and moving towards an independent village.

Kata kunci: *Manajemen SDM, Tata Kelola Keuangan Desa, BUMDES dan E-Government*

1. PENDAHULUAN

Pemerintah Desa (Desa, 2014) merupakan struktur organisasi pemerintahan paling rendah menjadi garda terdepan dalam pemberian pelayanan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat, oleh sebab itu kemampuan dan kapasitas aparatur Pemerintah Desa memegang peranan yang sangat penting. Dengan kompleksitas permasalahan yang dihadapinya, aparatur Pemerintahan Desa dituntut untuk memiliki perhatian dan tanggung jawab terhadap masyarakat desa. Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, bahwa Desa dan Desa Adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam konteks penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terpenting adalah bagaimana Pemerintah Desa mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan mampu meningkatkan daya saing Pemerintah Desanya (LAN, 2016). Hal tersebut hanya akan terwujud apabila urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Desa dapat terlaksana dengan baik dan didukung oleh kemampuan Sumber Daya Manusia dari aparatur desa sebagai penyelenggara proses pemerintahan dalam tataran Pemerintah Desa. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang baik sulit terwujud jika kapasitas aparatur Pemerintah Desa tidak memadai, tanpa kapasitas yang memadai membuka peluang akan gagal dalam menjalankan tugas dan fungsi desa. Namun demikian sampai saat ini secara umum kapasitas perangkat desa belum diketahui secara pasti (Asrori, 2014).

Dalam Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa juga turut mengatur pengembangan kapasitas Pemerintahan Desa melalui manajemen desa yang mencakup: (1) kebijakan Pemerintahan Desa, (2) perencanaan pembangunan desa, pengelolaan keuangan desa dan kebijakan penyusunan peraturan di desa. Menurut (Alam, 2016) menyebutkan bahwa kapasitas aparat desa dalam manajemen pemerintahan sesuai amanat UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa mencakup dalam: (1) Menata struktur Pemerintahan Desasesuai karakteristik masing-masing desa; (2) Kemampuan akunting (*accounting*) Perangkat Desa; (3) Kemampuan melakukan akuntabilitas pelaporan keuangan; (4) Kemampuan meningkatkan kematangan dalam melaksanakan peraturan terkait dengan Pemerintahan Desa; (5) Kemampuan mempersiapkan pembangunan desa yang cermat, termasuk didalamnya keseluruhan tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan dan (6) kemampuan menyusun membenahi sistem informasi desa yang meliputi informasi kependudukan dan sosial, neraca sumber daya, kondisi geografis dan topografi desa, informasi tentang aktivitas ekonomi, pasar dan unit usaha masyarakat serta keterkaitan interregional.

Salah satu langkah yang dilakukan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) untuk meningkatkan literasi dan pemahaman digital ditingkat pemerintahan terendah yakni Pemerintah Desa adalah dengan meluncurkan program desa misalnya dengan penerapan e Government Desa dan program desa cerdas (*smart village*) (Irawaty, 2023). Desa harus menaruh perhatian pada perkembangan teknologi informasi di era digital saat ini, terlebih penguasaan teknologi informasi yang menjadi salah satu indikator kemajuan bagi suatu negara. Desa sebagai bagian dari negara sudah seharusnya mulai menerapkan teknologi informasi mulai dari penyelenggaraan pemerintahan sampai dengan pengelolaan kehidupan sosial ekonomi masyarakatnya bahkan juga dalam bidang pembangunan desa serta dalam pengelolaan keuangan desa dan pengelolaan keuangan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) (Nuraini, 2016).

Penerapan teknologi di desa sejalan dengan berkembangnya konsep pembangunan desa berbasis Teknologi Informasi yang biasa disebut *smart village*, salah satunya dengan penerapan e Government Desa. Konsep *smart village* adalah desa yang menerapkan Teknologi Informasi tepat guna untuk mengembangkan potensi, meningkatkan ekonomi, dan menciptakan kemudahan dalam segala aspek kehidupan masyarakat (Nurrahman, 2022). Dalam hal ini Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Unjani memiliki kepedulian untuk dapat mewujudkan program yang telah dibuat oleh Pemerintah serta untuk membantu peningkatan kualitas Aparatur Pemerintah Desa dan wawasan masyarakat dalam penguasaan terhadap penggunaan teknologi Informasi, yaitu dengan memprogramkan dan melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat sebagai salah satu implementasi dari fungsi Tri Dharma Perguruan tinggi dengan mengusung judul : “Optimalisasi Sumber Daya Manusia Melalui Tata Kelola Keuangan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dalam Penerapan *E-Government* Di Kecamatan Cipeundeuy Kabupaten Subang.”

2. METODE PELAKSANAAN

Bentuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat yaitu sebagai berikut:

- a. Pemberian materi dalam bentuk ceramah, dilanjutkan dengan diskusi dalam bentuk tanya jawab yang dipandu oleh Moderator.
- b. *Focus Group Discussion* (FGD) dalam bentuk pendampingan kepada peserta pelatihan yang didampingi oleh para tutor
- c. Workshop penggunaan teknologi informasi dalam penerapan e Government desa.
- d. Tutorial penggunaan aplikasi tentang pelaporan penggunaan keuangan desa, pembuatan pelaporan penggunaan keuangan Bumdes dan tutorial dalam pengembangan usaha Bumdes.

Pelaksana dalam Kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat dengan judul: Optimalisasi Sumber Daya Manusia Melalui Tata Kelola Keuangan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dalam Penerapan *E-Government* Di Kecamatan Cipeundeuy Kabupaten Subang adalah seluruh Dosen di lingkungan Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Unjani dan dosen dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis sebagai Narasumber dan pakar manajemen dalam kegiatan pengabdian Masyarakat ini yakni terkait Tata Kelola Keuangan Desa, Tata cara Pembuatan Laporan Penggunaan keuangan Desa sedangkan untuk tata kelola keuangan Bumdes dan tata cara pembuatan laporan penggunaan keuangan Bumdes dan tata cara pemasaran produk Bumdes disampaikan oleh pakar dari dosen Ilmu Pemerintahan yaitu oleh Bapak Dr. Agustina Setiawan, S.IP.,M.Si. Sedangkan tata cara pembuatan Proposal dalam pengembangan Bumdes disampaikan oleh para dosen di lingkungan Program Studi Ilmu Pemerintahan dengan metode peserta pelatihan dan pendampingan dengan mekanisme dibuat kelompok dalam setiap desanya. Setiap kelompok didampingi oleh para dosen di lingkungan Program Sru di Ilmu Pemerintahan dengan cara pendampingan dan tutorial dalam pembuatan Proposal tentang pengembangan Bumdes. Produk yang dihasilkan adalah dalam bentuk Proposal yang sesungguhnya dari setiap kelompok perdesanya.

Adapun yang dijadikan sasaran khalayak dalam kegiatan PPM tersebut sebagai berikut:

1. Aparatur Pemerintah Kecamatan
2. Para Kepala Desa di lingkungan Kecamatan Cipeunseuy Kabupaten Subang.
3. Aparatur Pemerintah Desa di lingkungan Kecamatan Cipeundeuy kabupaten Subang
4. Perwakilan dari Badan Permusyawaratan Desa di lingkungan Kecamatan Cipeundeuy Kabupaten Subang
5. Perwakilan dari Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di lingkungan Kecamatan Cipeundeuy Kabupaten Subang

Perwakilan dari Pelaku UMKM di lingkungan Kecamatan Cipeundeuy Kabupaten Subang.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil kegiatan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dengan judul: Optimalisasi Sumber Daya Manusia Melalui Tata Kelola Keuangan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dalam Penerapan *E-Government* Di Kecamatan Cipeundeuy Kabupaten Subang ini dilaksanakan dalam berbagai bentuk atau tahapan kegiatan yang dilakukan, antara lain meliputi:

1. Tahap Persiapan; dalam tahap persiapan ini penyelenggara kegiatan pelaksana Pengabdian kepada masyarakat yang diselenggarakan oleh dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Unjani melakukan survey lapangan kepada lokasi yang dijadikan objek kegiatan PPM ini, dengan tujuan mengidentifikasi atau belanja masalah di seluruh desa yang akan dijadikan lokasi dalam kegiatan PPM, dan mengadakan sosialisasi terkait akan diselenggarakannya kegiatan ini, sosialisasi dibantu oleh aparatur Pemerintah Kecamatan dengan cara memberikan informasi kepada desa di lingkungan Kecamatan Cipeundeuy Kabupaten Subang. Selain itu juga sosialisasi ini dilakukan kepada pengelola BUMdes, anggota BPD dan pelaku UMKM di lingkungan Kecamatan Cipeundeuy Kabupaten Subang. Tahap persiapan membutuhkan waktu sekitar selama 3 (tiga) minggu.
2. Tahap Pelaksanaan; Kegiatan pengabdian kepada Masyarakat dengan judul “Optimalisasi Sumber Daya Manusia Melalui Tata Kelola Keuangan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dalam Penerapan *E-Government* Di Kecamatan Cipeundeuy Kabupaten Subang.” Kegiatan ini dilaksanakan melalui metode konvensional atau secara luring atau dilakukan dengan cara tatap muka yang bertempat terpusat di Balai Desa Wantilan Kecamatan Cipeundeuy Kabupaten Subang, mengingat aula kecamatan sedang di renovasi yang terindikasi tidak mungkin bisa dipakai untuk pelaksanaan kegiatan tersebut. Tahapan dalam tahap Pelaksanaan ini meliputi: pertama dilakukan dengan penyampaian materi secara ceramah dan dilanjutkan sesi diskusi dalam sesi pemberian materi. Selain pemberian materi dalam bentuk ceramah dilanjutkan dengan sesi *Focus Group Discussion* yakni dalam menggali atau belanja masalah terkait potensi desa dan potensi Bumdes yang dituangkan langsung praktek pembuatan proposal pengembangan usaha Bumdes. Langkah terakhir dalam tahap pelaksanaan adalah melalui pelatihan atau workshop dengan cara tutorial terkait tata Kelola keuangan desa, tata cara pembuatan laporan penggunaan keuangan desa, tata Kelola keuangan Bumdes, tata cara pembuatan laporan penggunaan Bumdes serta melakukan pendampingan dalam pembuatan proposal pengembangan usaha Bumdes serta penggunaan aplikasi atau sistem dalam penerapan *e Government Desa*.
3. Tahap Evaluasi; pada tahap kegiatan ini, tim pelaksana kegiatan pengabdian kepada masyarakat mengevaluasi seluruh kegiatan dari mulai tahap persiapan, pelaksanaan, pembuatan laporan kegiatan sampai kepada luaran produk dari kegiatan PPM ini, misalnya hasil kegiatan dipublikasikan di media sosial seperti dipublikasikan di IG Prodi Ilmu Pemerintahan, IG FISIP Unjani, di beberapa FB dosen dan terutama melalui publikasi ilmiah yang akan dipublikasikan dalam jurnal Abdimas yang terindek SINTA.

Adapun evaluasi secara keseluruhan terhadap program dari kegiatan PPM ini mensinkronisasikan dari hasil belanja masalah yang dilakukan dalam tahap awal, dengan pada saat pemberian pelatihan atau workshop mengenai tata Kelola keuangan desa, tata cara

pembuatan laporan penggunaan keuangan desa, tata Kelola keuangan Bumdes, pembuatan proposal pengembangan usaha Bumdes, penggunaan aplikasi atau sistem pelaporan keuangan, serta setelah pemberian pelatihan atau workshop dalam kegiatan PPM ini, akan terlihat dari pemahaman atau penguasaan dalam penggunaan Teknologi Informasi atau aplikasi yang telah diberikan dalam pelatihan tersebut. Diharapkan program kegiatan PPM ini berlanjut untuk mengarah menjadi desa binaan dengan selalu memberikan pendampingan untuk kemajuan desa tersebut menuju ke arah desa yang mandiri dengan konsep desa menerapkan e Government dalam pelayanan desa tersebut.

Kegiatan Pengabdian masyarakat ini tidak cukup hanya dilaksanakan oleh tim pelaksana saja, akan tetapi perlu adanya keterlibatan dari khalayak sasaran demi terselenggaranya kegiatan PPM secara optimal. Adapun keterlibatan khalayak sasaran yang dijadikan sebagai mitra dalam kegiatan PPM ini adalah Pemerintah Desa dilingkungan kecamatan Cipeundeuy kabupaten Subang, dalam hal ini Camat Cipeundeuy menyiapkan peserta pelatihan yang terdiri dari para Kepala Desa, perwakilan aparaturnya Pemerintah Desa, perwakilan anggota BPD, perwakilan anggota Bumdes, perwakilan pelaku UMKM. Selain menyediakan peserta kegiatan mitra juga menyediakan tempat kegiatan dan menyediakan jaringan internet selama kegiatan PPM berlangsung sebagai bentuk Kerjasama dan dukungan yang optimal dari kedua belah pihak, sebagai bentuk realisasi dan aktualisasi dari bentuk Kerjasama antara Perguruan Tinggi dan Pihak pemerintah.

Adapun hasil dari pelaksanaan Kegiatan Pengabdian Kepada masyarakat dengan judul “Optimalisasi Sumber Daya Manusia Melalui Tata Kelola Keuangan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dalam Penerapan *E-Government* Di Kecamatan Cipeundeuy Kabupaten Subang.”Optimalisasi Sumber Daya Manusia Melalui Tata Kelola Keuangan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dalam Penerapan *E-Government* Di Kecamatan Cipeundeuy Kabupaten Subang” sebagai berikut:

1. Waktu Kegiatan

- a. Proses persiapan. Proses kegiatan PPM Prodi Ilmu Pemerintahan secara keseluruhan dilaksanakan secara selama 6 (enam) bulan penuh, dari mulai pembuatan proposal, pengiriman informasi tentang kegiatan, survei lapangan, belanja masalah, dan pelaksanaan kegiatan serta pembuatan laporan bahkan sampai ke publikasi jurnal
- b. Pengiriman informasi awalnya dilakukan melalui komunikasi Via telepon, setelah mendapat persetujuan kesediaan sebagai tempat kegiatan maka dilakukan secara resmi melalui pengiriman surat dari Lembaga kepada Camat Kecamatan Cipeundeuy Kabupaten Subang .
- c. Langkah berikutnya melakukan survei lapangan dengan tujuan belanja masalah mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi oleh seluruh desa yang berada di lingkungan Kecamatan Cipeundeuy, serta mengkomunikasikan untuk kegiatan puncak PPM tersebut
- d. Kegiatan puncak dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 mulai pukul 07.³⁰ sd 16.⁰⁰ WIB.

2. Sifat dan Tempat Kegiatan

- a. Kegiatan PPM dengan judul “Optimalisasi Sumber daya Manusia melalui Tata Kelola Keuangan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) dalam penerapan e Government di Kecamatan Cipeundeuy Kabupaten Subang ini dilaksanakan bersifat *offline* atau *luring* atau secara tatap muka langsung.
- b. Tempat kegiatan PPM ini terpusat di Aula/ Balai Desa Wantilan Kecamatan Cipeundeuy Kabupaten Subang , mengingat Aula kantor Kecamatan sedang

direnopasi jadi tidak mendukung untuk dilaksanakannya kegiatan PPM tersebut.

3. Peserta kegiatan

- a. Peserta kegiatan PPM sebanyak 70 orang peserta yang berasal dari Unsur Aparat Kecamatan, Para Kepala Desa di lingkungan Kecamatan Cipeundeuy, Aparat Pemerintah Desa, perwakilan anggota BPD, perwakilan dari pengelola Bumdes dan perwakilan pelaku UMKM di lingkungan Kecamatan Cipeundeuy Kabupaten Subang.

4. Pemateri Kegiatan PPM

Pemateri dalam kegiatan PPM dengan judul “Optimalisasi sumber daya manusia melalui Tata Kelola Keuangan Bumdes dalam penerapan e Government di Kecamatan Cipeundeuy Kabupaten Subang” sebagaiberikut:

- a. Dr. V Santi Paramitha, SE.,M.Si, membahas mengenai tata Kelola keuangan desa, tata cara pembuatan laporan penggunaan keuangan desa serta penggunaan aplikasi terkait pelaporan keuangan dan pemasaran produk dari Bumdes.
 - b. Dr. Agustina Setiawan, S.IP.,M.Si mengenai Tata Kelola Keuangan Bumdes dan tata cara pembuatan laporan keuangan Bumdes serta kebijakan tentang Bumdes.
 - c. Seluruh Dosen di lingkungan Prodi Ilmu Pemerintahan sebagai Tutor dalam kegiatan FGD dengan PIC FGD Dr. Titin Rohayatin, S.IP.,M.Si
- ### 5. Materi Kegiatan dalam “Optimalisasi sumber daya manusia melalui tata Kelola Keuangan Bumdesa dalam penerapan e- government di Kecamatan Cipeundeuy Kabupaten Subang” sebagai berikut:
- a. Tata Kelola keuangan Bumdes; Bumdes memiliki kewajiban antara lain (1) membuat laporan keuangan seluruh unit-unit usaha Bumdes setiap bulannya dengan jujur dan transparan. (2). Memberikan laporan perkembangan setiap unit-unit usaha Bumdes kepada Masyarakat desa melalui musyawarah desa sekurang-kurangnya 2 kali dalam satu tahun.
 - b. Prinsip umum Bumdes meliputi : prinsip pembukuan keuangan Bumdes tidak berbeda dengan Lembaga keuangan lain, Bumdes harus melakukan catan harian atau pembukuan yang ditulis secara sistematis dari transaksi yang terjadi setiap hari, Pencatatan transaksi umumnya menggunakan system akuntansi.
 - c. Tujuan pebukuan keuangan meliputi : (1) untuk mengetahui perkembangan Perusahaan dari waktu ke waktu, baik perkembangan omset, penjualan, laba/ rugi, maupun struktur pemodal; (2). Untuk mengetahui kemungkinan kerugian sejak dini sehingga gulung tikar bisa dihindari; (3). Untuk menngetahui sumber dan penggunaan dana Bumdes sehingga bisa mengevaluasi kinerja keuangan Bumdes; (4). Untuk mengetahui kondisi persediaan barang/ jasa setiap saat sehingga dapat digunakan untuk Menyusun strategi manajemen persediaan.
 - d. Memahami Siklus Akuntansi.



- e. Jenis-jenis laporan keuangan meliputi; laporan Neraca, Laporan Laba rugi, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, catatan atas laporan keuangan
- f. Neraca adalah laporan yang berisi harta (asset), uang atau kewajiban-kewajiban pada pihak-pihak lain (liabilitas) beserta modal (capital) dari suatu Perusahaan pada saat tertentu. Oleh karena itu neraca terdiri dari 2 kelompok yaitu Aktiva, kewajiban dan modal.
- g. Laporan laba rugi merupakan laporan yang menyajikan informasi pengeluaran, pendapatan serta laba atau rugi yang dihasilkan Perusahaan selama periode tertentu.
- h. Laporan cash flow atau dikenal juga dengan nama laporan arus kas adalah jenis laporan yang berisi tentang informasi penerimaan dan pengeluaran kas dalam sebuah perusahaan pada periode waktu tertentu.
- i. Laporan perubahan modal adalah laporan yang menyajikan perubahan equitas selama satu periode akuntansi. Laporan ini terdiri dari beberapaelemen diantaranya modal awal periode penambahan dan pengurangan selama satu periode serta modal akhir periode.

6. Materi Tata Kelola Keuangan Desa

Adapun beberapa hal yang harus diperhatikan terkait Tahap Pengelolaan Keuangan Desa adalah Status sumber daya manusia kepala desa (kader desa dan badan musyawarah desa), Sarana dan prasarana perdesaan kebijakan tingkat desa. Prosesnya dimulai dari tahap perencanaan, penganggaran, pengelolaan dan pengawasan. Mulai dari tahap perencanaan, pemerintah desa harus memperhatikan koordinasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Perdesaan (RPJM) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP) dengan rencana Pemerintah Pusat, Provinsi, Kabupaten atau Kota, tingkat partisipasi BPD dan kualitas RKP perdesaan.

Pada tahap anggaran, pada saat PTKPD membuat dokumen anggaran harus memperhatikan penyatuan dan keterpaduan penyusunan anggaran, penyatuan kepala desa dan BPD, serta penilaian APB menurut daerah. Pada tahap administrasi, PTKPD

menyiapkan pengelolaan pembukuan dan bertanggung jawab atas pencatatan aset desa serta konsep komoditas dan belanja modal.

PTKPD menyiapkan jumlah sistem akuntabilitas dan standar pelaporan yang harus dijalankan. Terakhir, tahapan supervisi merupakan tahapan terakhir dari pengelolaan keuangan desa terkait dengan efektivitas penggunaan dana desa. Pengawasan dilakukan oleh suatu badan pengawas khususnya APIP Kabupaten atau kota (Badan Pengawas Internal Pemerintah). Selama proses implementasi, baik regulator maupun masyarakat dapat memberikan peringatan atas risiko kecurangan dalam pengelolaan keuangan pedesaan. Seperti: Penggunaan uang desa secara ilegal (pencurian uang tunai dan uang tunai), Menandai dan / atau membeli kembali barang atau jasa, dan Penggunaan aset desa secara ilegal (penyalahgunaan atau pencurian) untuk kepentingan pribadi aparat desa. Kecurangan-kecurangan tersebut di atas hanyalah sebagian dari risiko yang mungkin timbul dalam mengelola keuangan desa. Mungkin ada banyak kecurangan lain dalam pengelolaan keuangan pedesaan. Karakteristik dan perencanaan strategis yang berbeda dari setiap desa juga dapat terjadinya kemungkinan penipuan.

Prioritas Mengelola Keuangan Desa

Keuangan tingkat desa yang digunakan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat berupa upaya peningkatan pendapatan masyarakat di tingkat desa. Pelatihan kewirausahaan dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan pendapatan guna memperluas skala ekonomi individu warga atau kelompok masyarakat dan desa. Pemerintah kabupaten / kota melalui pemerintah desa memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat dengan melihat jenis desa yang terbagi menjadi tiga jenis:

- a. Desa tertinggal dan / atau sangat tertinggal harus memprioritaskan kegiatan pemberdayaan untuk membuka lapangan kerja dan / atau usaha baru. Selain itu, tujuan Dana Desa adalah untuk memberikan akses atau infrastruktur bagi pelaksanaan pekerjaan dan usaha warga atau masyarakat mulai dari proses produksi hingga penjualan produk.
 - b. Desa Berkembang, untuk melakukan kegiatan pemberdayaan bertujuan untuk meningkatkan beban kerja atau kualitas, atau meningkatkan kualitas produksi dari proses pemasaran produk. Dana desa digunakan untuk memfasilitasi kebutuhan modal atau memperoleh dana.
 - c. Maju dan / atau desa mandiri merupakan kegiatan pemberdayaan yang dikembangkan bagi masyarakat visioner dengan menjadikan desa sebagai lumbung ekonomi atau ibu kota rakyat. Desa Maju akan mandiri atau berdaulat secara ekonomi, serta mampu mengembangkan sumber daya ekonomi dan potensi manusia secara berkelanjutan.
7. Materi FGD
- a. Dalam FGD ini peserta kegiatan di damping menggunakan beberapa aplikasi terkait pembuatan pelaporan keuangan desa dan pelaporan penggunaan keuangan Bumdes.
 - b. Selain tutorial penggunaan aplikasi terkait pelaporan penggunaan keuangan desa peserta pelatihan di berikan templete pembuatan proposal pengembangan usaha Bumdes di desa nya masing-masing sesuai dengan potensi desa yang dimilikinya.

4. KESIMPULAN

Atas dasar dari analisis dan pembahasan dalam kegiatan PPM ini, maka ada beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini memberikan kontribusi positif bagi upaya meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan penguasaan terhadap tata Kelola keuangan desa, tata Kelola keuangan bumdes dan tata cara pembuatan pelaporan dalam penggunaan keuangan desa dan keuangan Bumdes
2. Penggunaan aplikasi yang mendukung pembuatan pelaporan keuangan desa dan keuangan Bumdes dapat mempercepat dan memudahkan factor Sumber Daya aparatur pemerintah dan pengelola Bumdes dalam pembuatan laporan dan dapat mempercepat secara sistematis dalam pembuatan laporan tersebut.
3. Penggunaan berbagai aplikasi sebagai bentuk penggunaan teknologi informasi berbasis digital dalam rangka implementasi dan aktualisasi dalam penerapan konsep e Government.
4. Pengelolaan keuangan desa oleh pemerintah desa didasarkan pada prinsip transparansi. (keterbukaan, semua kegiatan dan informasi pengelolaan dapat dipahami dan diawasi oleh pihak berwenang lainnya). Dan prinsip tanggung jawab (setiap tindakan atau kinerja harus dilaporkan kepada pihak yang benar atau tidak bertanggung jawab.
5. Pihak yang bertanggung jawab berhak meminta informasi tentang pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan dan penggunaan anggaran, partisipatif (*melalui tindakan termasuk partisipasi masyarakat. Secara langsung maupun tidak langsung melalui perwakilan organisasi yang dapat mengkomunikasikan harapan Prosiding*) dan Disiplin Anggaran (Anggaran harus dicatat sesuai dengan prinsip keuangan desa).
6. Beberapa aplikasi atau link sebagai bentuk penerapan e Government adalah software yang menjadi andalan dalam mengelola laporan keuangannya. Dengan memanfaatkan software tersebut pemerintah desa tidak perlu khawatir kekurangan SDM dalam pengelolaan laporan keuangan dana desa. Karena aplikasi tersebut dikelola oleh tim professional di seluruh Indonesia dalam mengelola laporan keuangan dan menghindari tindakan fraud ataupun defisit anggaran.

DAFTAR PUSTAKA

- Alam. (2016). human Resources Development Strategies for Villages Apparatus in Realizing Effective Village Governance at Boalemo Regency, Gorontalo. *IJES*, 43-47.
- Asrori. (2014). Kapasitas Perangkat Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Desa di Kabupaten Kudus. *Jurnal Kemendagri*, 101-116.
- Boundless. (2016, May 26). "*Politics*.". Retrieved Juny 2016, 01, from Boundless Sociology: <https://www.boundless.com/sociology/textbooks/boundless-sociology-textbook/stratification-inequality-and-social-class-in-the-u-s-9/the-impacts-of-social-class-77/politics-460-4972/>
- Desa, K. U. (2014).
- Irawaty, T. (2023). Optimalisasi Sumber Daya Manusia Dalam Penerapan E-Government di Desa Wantilan. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Membangun Negeri*, 181-191.

- LAN. (2016). Kajian Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa.
- Miles, M. B., & Huberman, A. Michael. (1992). *Qualitative Data Analysis, ter: Tjetjep Rohendi Rohendi dengan Judul: Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: UI Press.
- Nuraini. (2016). Pengembangan Smart Village Sebagai Upaya Menjalankan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) pada Masa Pandemi Covid-19. *BRILLIANT Jurnal Riset dan Konseptual*, 862-873.
- Nurrahman. (2022). Pengembangan Desa Sukapura Menuju Smart Village. *Wahana Bhakti Praja*, 89-109.
- Samovar, L., Porter, R., R.Mc Daniel, E., & Roy, C. (2013). *Communication Between Cultures.Eighth Edition*. Wadsworth: Cengage Learning.
- Würtz, E. (2005). Intercultural Communication on Web sites: A Cross-Cultural Analysis of Web sites from High-Context Cultures and Low-Context Cultures. *Journal of Computer-Mediated Communication*, 11: 274–299.